BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era global yang sedang terjadi, tentu saja memberikan perubahan maupun dampak kepada seluruh bidang kehidupan. Era global yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu memberikan dampak langsung yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bidang ataupun instansi. Salah satu dampak yang terasa langsung oleh seluruh bidang terletak pada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi tentu saja merupakan suatu hal vital yang melekat pada kehidupan manusia (dalam Fitriani, 2023). Pada era globalisasi ini teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran vital bagi kehidupan manusia sebagai wadah atau tempat dalam pengelolaan data maupun fakta yang dibutuhkan oleh seluruh bidang ataupun instansi (dalam Bratha, 2022). Selain dari pengelolaan data maupun fakta, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang akan menjadi peran pendukung dalam proses pengembangan kompetensi sumber daya manusia disuatu instansi.

Perkembangan yang terjadi ini tentu saja selain memberikan dampak yang baik bagi seluruh bidang ataunpun instansi, memberikan dampak terhadap persaingan yang semakin ketat. Dampak terhadap persaingan ini menimbulkan suatu perlombaan pada seluruh instansi agar memenangkan persaingan dan unggul dari seluruh instansi yang ada. Maka dari itu, seluruh instansi menuntut sumber daya manusianya untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui penciptaan inovasi-inovasi baru. Kebutuhan informasi dan komunikasi yang cepat, tepat, dan akurat tentu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan suatu data yang konkret, tentu saja dalam suatu lembaga atau instansi. Inovasi-inovasi yang tercipta guna mendukung teknologi informasi dan komunikasi akan membantu instansi dalam mengolah seluruh akses untuk data yang dibutuhkan dengan mudah. Maka dari itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah kinerja

sumber daya manusia dan juga keberlangsungan suatu instansi (dalam Bratha, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berdampak baik bagi pengelolaan data dan infornasi yang konkret tetapi dapat mewujudkan suatu tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Sadjijono (dalam Maryam, 2016) mengemukakan bahwa "*Good Governance* merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara". Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak bagi penggunanya terkait pengelolaan data sumber daya manusia pada suatu lembaga atau instansi, sehingga tersedianya data atau informasi yang dibutuhkan menjadi data yang aktual dan akurat (Yustika dkk., 2023). Salah satu sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu lembaga atau instansi dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah pegawai atau karyawan.

Pemanfaatan teknologi tidak bisa lepas dari penggunanya yaitu Sumber Daya Manusia. Pada dasarnya hal yang paling berperan dalam mencapai kemaksimalan tujuan suatu instansi adalah sumber daya manusia, maka dari itulah diperlukannya suatu pengembangan yang memiliki tujuan untuk menciptakan sumber daya yang produktif. Salah satu faktor pendukung dari berjalannya implementasi sistem informasi adalah dengan memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Efektivitas digunakan sebagai suatu konsep terkait keefektifan suatu lembaga/instansi yang memiliki tujuan untuk meraih dan mewujudkan sesuatu. Efektivitas dari sebuah lembaga dapat dilakukan dengan menitikberatkan beberapa aspek, contohnya seperti tingkat kepuasan, bagaiamana cara mereka melakukan sesuatu untuk mencapai visi dan visi, dan pelatihan ataupun pengembangan sumber daya manusia.

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen dalam sebuah perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi, keandalan suatu sistem informasi dalam perusahaan terletak pada keterkaitan antar

Arkania Chelsea Islami, 2024

3

komponen yang ada sehingga dapat mengjasilakn aliran informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, dan relevan bagi kepentingan operasi perusahaan (Rochaety, 2017, Hal. 6) Selain itu juga terdapat pendapat terkait Sistem Informasi, Menurut buku Hutahaean (2014, hal. 15) "Sistem Informasi merupakan sebuah sistem yang terdapat di dalam organisasi untuk memnuhi hutakebutuhan organisasi seperti pengelolaan harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, kegiatan strategi, dan juga menyediakan pihak eksternal tertentu dalam laporan-laporan yang dibutuhkan".

Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses penanganan berbagai macam permasalahan dalam ruang lingkup pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja yang dimana dapat dikatan sebagai penunjang dari aktivitas organisasi ataupun perusahaan guna mencapai tujuan yang telah dirancang. A.F. Stoner (Rusby, 2019) mengemukakan bahwa "manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang memerlukannya". Manajemen sumber daya manusia ini juga melingkup beberapa aspek seperti desain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, dan beberapa aspek lainnya.

Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B merupakan suatu lembaga institusi atau lembaga pemerintah yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B sebagai salah satu Satuan Kerja (SatKer) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), berdasarkan "Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", mempunyai tugas pokok: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan lingkup manajemen sumber daya manusia yang mengacu kepada aspek pengembangan karyawan dan evaluasi kinerja. Berdasarkan pra-

Arkania Chelsea Islami, 2024

penelitian yang difokuskan kepada pegawai di Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B

No.	Unit Kerja	Penila	aian Kinerja	Target Sasaran	
		2022	2023	2024	Kinerja
1.	Kehakiman	85,3	86,5	86,5	100%
2.	Panitera Muda	83,4	84,6	85	-
3.	Panitera	84,4	85,3	85,5	-
	Pengganti				
4.	Jurusita	82,6	83,4	84,4	-
5.	Sub Bagian	86,7	87,3	87,5	-
	Rata-Rata	84,5	85,5	85,7	-

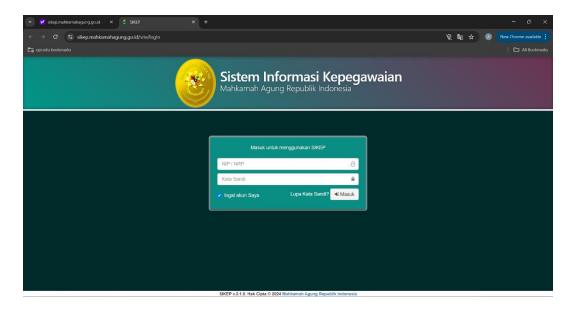
Sumber: Sub. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil dari penilaian kinerja pegawai tiap unit kerja sudah termasuk di dalam kategori baik, akan tetapi masih belum mencapai target sasaran kinerja sebesar 100%. Hal ini tentu mencakup beberapa aspek seperti mutu pelayanan, kompetensi SDM, integritas, dan pengembangan SDM. Meskipun demikian, tetap terjadinya penaikan penilaian kinerja antara tahun 2022-2024. Maka dari itu perlu adanya pengembangan dari pegawai maupun pimpinan terkait peningkatan penilaian kinerja sumber daya manusianya agar dapat meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B.

Kebijakan yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B dalam mengembangkan *e-government* guna pengembangan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara elektronik untuk memaksimalkan mutu

pelayanan kepada masyarakat dan guna melakukan strukturisasi struktur manajemen melalui pemaksimalan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengembangkan suatu teknologi informasi dan juga melakukan perwujudan *e-government* pada Lembaga Yudikatif melalui Sistem Informasi Kepegawaian yang disingkat SIKEP versi 1. Pada awalnya aplikasi SIKEP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung digunakan hanya untuk merekam data dan dokumen elektronik pegawai, yang dimana seluruh data pegawai akan tersimpan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pegawai yang bersangkutan (Eriani & Verawati, 2021).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju pesat berdampak juga pada perkembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, yang pada awalnya hanya untuk merekam data dan dokumen elektronik pegawai, berkembang menjadi penambahan fitur pelayanan untuk pegawai, meliputi kenaikan pangkat untuk pegawai, layanan untuk ujian dinas bagi pegawai, layanan proses promosi dan mutasi, monitoring kepegawaian, presensi pegawai, serta layanan data untuk mengiti data LHKPN untuk para Pejabat Negara dan pegawai di lingkup pemerintahan, dan juga dapat dilihat pada gambar di bawah berikut:



Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gambar 1. 1

Home Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)



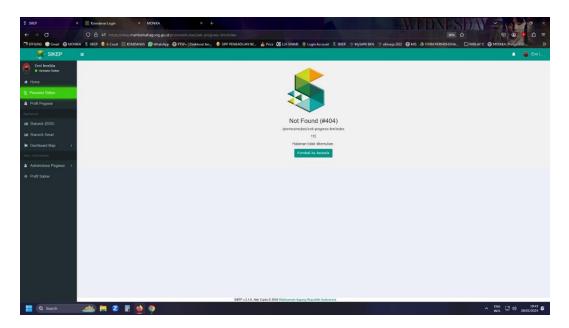
Sumber: Sekretaris Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B

Gambar 1. 2 Fitur Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 1 yang dikembangkan oleh Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. Ini terjadi pada tahun 2010 yang pada awalnya memiliki fungsi untuk menyimpan data pegawai dan dokumen-dokumen kepegawaian. Keberadaan aplikasi SIKEP ini diharapkan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses data para pegawai. Pada tahun 2015 aplikasi SIKEP ini semakin berkembang menjadi versi 2.0, versi ini menambahkan fitur-fitur baru untuk mempermudah pegawai terutama untuk layanan kepegawaian, seperti layanan promosi dan mutasi pegawai, layanan yang berisi data untuk LHKPN bagi pejabat dan pegawai yang memiliki kewajiban untuk pelaporan harta, layanan kenaikan pangkat, layanan ujian dinas, dan juga layanan yang berfungsi untuk mengolah banyak data untuk kepentingan suatu instansi/lembaga. Untuk semakin berkembangnya aplikasi SIKEP, maka Mahkamah Agung mengintegrasikan aplikasi SIKEP versi 1.0 dengan versi 2.0 menjadi aplikasi SIKEP versi 3.0. SIKEP versi 3.0 ini dimaksimalkan fungsinya oleh Mahkamah Agung menjadi suatu sarana

dalam pengambilan keputusan yang berkenaan sumber daya dari manusia, berbentuk sebuah promosi, mutasi atau pemindahan tempat kerja, pertukaran posisi kerja, pemberian *rewards*, serta pelaksanaan tindakan disiplin bagi para pegawai.

Aplikasi SIKEP yang telah diimplementasikan oleh Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B sejak 2019 ini walaupun sudah semakin dikembangkan, tetap dirasa oleh sumber daya manusianya masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga berdampak kepada efektivitas manajemen sumber daya manusia. Permasalahan-permasalahan yang dirasakan adalah banyaknya gangguan koneksi yang terjadi dari pusat (Mahkamah Agung RI), sering terjadinya *maintenance*, banyaknya dokumen fisik pegawai yang belum lengkap ter-*upload* pada profil pegawai masing-masing maka *e-document* masih terbilang belum lengkap 100%, dan untuk absensi pulang masih terbilang sulit untuk *login* SIKEP karena terjadinya bentrok se-indonesia. Contoh terjadinya *maintenance* pada aplikasi SIKEP yang masih sering terjadi, sebagai berikut:



Sumber: Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

Gambar 1. 3 *Maintenance* Aplikasi SIKEP

Berdasarkan hasil Pra-Penelitian yang peneliti fokuskan pada manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pengguna SIKEP

No.	Unit Kerja	Pengguna SIKEP						
	_	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Kehakiman	22	22	21	24	19		
2.	Kepaniteraan	9	9	9	9	9		
3.	Panitera	16	17	17	17	11		
	Pengganti							
4.	Jurusita	8	8	7	7	6		
5.	Kesekretariatan	9	10	9	9	9		
	TOTAL	64	66	63	66	54		

Sumber: Sub. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B

Berdasarkan Tabel 1.2, pengguna aplikasi SIKEP di Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B selama 5 tahun terakhir, yang dimana hanya mencakup pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai yang masih berstatus Honorer tidak dapat menggunakan aplikasi SIKEP. Pengguna SIKEP bisa saja mengalami penurunan atau kenaikan ditahun yang sama karena adanya mutasi pegawai ke Pengadilan Negeri Karawang ataupun ke luar Pengadilan Negeri Karawang. Pada tahun 2024 terdapat 54 pegawai yang menggunakan aplikasi SIKEP. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B mengimplementasikan Teknologi Informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, yaitu aplikasi SIKEP. Pada masa *Covid-19* Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B memutuskan untuk menggunakan Aplikasi SIKEP guna menjaga jarak fisik dan mengurangi kegiatan yang bersifat tatap muka.

Dalam hal ini teori manajemen sumber daya manusia memberikan landasan teoritis yang solid untuk memahami berbagai aspek manajemen sumber daya

manusia, yang dimana terdapat relevansi dengan penelitian ini dan bermanfaat dalam memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun relevansi dengan penelitian ini yang melihat bahwa pengembangan sumber daya manusia yang mencakup mutu pelayanan, kopetensi sumber daya manusia, dan juga integritas. Maka dari itu teori utama (*Grand Theory*) yang dijadikan sebagai dasar untuk penelitian ini adalah Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan (Rusby, 2019:2) dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Terhadap Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B".

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang tentu saja cepat dan akurat diperlukan oleh seluruh instansi untuk memberikan suatu data dan informasi yang asli. Maka dari itu untuk mendukung hal tersebut, terciptalah alat-alat canggih yang dapat membantu seluruh instansi dalam mendapatkan, menyimpan, dan mengolah segala data dengan mudah. Selain daripada itu, setiap instansi yang memiliki teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni dan terintegrasi serta didukung dengan aplikasi pendukung teknologi modern, diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan instansi maupun sumber daya manusianya.

Masalah yang terjadi terkait teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B terletak pada Sumber Daya Manusianya dan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang masih terbilang banyak kekurangan (*errors*). Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan terkait penggunaan aplikasi SIKEP agar efektivitas manajemen Sumber Daya Manusianya semakin meningkat dan terjaga.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membatasi penelitian dengan faktor teknologi yang diimplementasikan dalam pekerjaan. Berdasarkan ursaian dan permasalahan yang dibahas pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Gambaran Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B?
- Bagaimana Gambaran Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B?
- 3. Apakah terdapat Pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) terhadap Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melanjutkan kajian secara ilmiah yang lebih dalam terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) serta memperoleh pengetahuan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) terhadap efektivitas manajemen sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B.

Sedangkan secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Untuk mengetahui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B.
- Untuk mengetahui Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B.
- Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) terhadap Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikaan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan namanya, manfaat teoritis ini memiliki manfaat yang berjangka panjang dalam lingkup pengembangan teori pembelajaran dari hasil penelitian yang nantinya dapat digunakan secara teoritis (akademis). Maka dari itu terdapat manfaat teroritis yang diharapkan dari penelian ini sebagai berikut:

- a. Bagi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Terhadap Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan juga sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

2. Kegunaan Praktik

Untuk manfaat praktis adalah suatu manfaat yang dapat digunakan dan juga diimplementasikan secara langsung pada ilmu tertentu. Maka dari itu terdapat manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan baru untuk peneliti dalam mengetahui Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Terhadap Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B.
- b. Bagi Lembaga/Instansi, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah informasi-informasi baru terkait teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh pegawai Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B yang menggunakan aplikasi SIKEP dan juga untuk mempermudah pengaksesan data para pegawai, khususnya dalam bentuk dokumen elektronik/digital.

c. Bagi Penelitian, hasil yang diharapkan pada penelitian ini adalah informasiinformasi baru terkait teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Selain itu juga implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lembaga-lembaga yang ada, khususnya pada Lembaga Yudikatif.